

SIARAN PERS

BPK RI Serahkan LHP LKPD 2024 dan IHPD kepada DPR Papua Barat, Soroti Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Manokwari, 23 Juli 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat hari ini secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat. Penyerahan ini menandai komitmen bersama antara BPK, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan DPR Papua Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, yang berkesempatan menyerahkan langsung LHP ini, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPR Papua Barat dan Gubernur Papua Barat beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang terjalin. "Kami bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024. IHPD ini diharapkan dapat mendorong Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, IHPD juga diharapkan dapat memicu DPR Papua Barat untuk lebih intensif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. "Dampaknya adalah pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel," tambah Staf Ahli BPK RI.

IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya selama tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini sebagai dasar perumusan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan permasalahan signifikan yang ditemukan, BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK berharap Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya, termasuk pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah.

"Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR Papua Barat yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat," pungkas Staf Ahli BPK RI. Ia juga mengucapkan terima kasih tulus kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI.